

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA OLEH NOTARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan



Oleh:

Muhammad Hafidz Firdaus

217191010

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2022

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN TESIS UNTUK DIUJI

Nama : Muhammad Hafidz Firdaus
N.I.M : 217191010
Program Studi : Magister Kenotariatan

JUDUL TESIS :

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA OLEH NOTARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012**

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan

Jakarta, 28 Desember 2021

Pembimbing Tesis,



(Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.)

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN TESIS

Nama : **Muhammad Hafidz Firdaus**
NIM : **217191010**

JUDUL TESIS:

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
OLEH NOTARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-
X/2012**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan **LULUS** dalam sidang ujian tanggal 17 Januari 2022, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

- 1. Ketua Penguji : Prof. Mella Ismelina, F.R., S.H.**
- 2. Anggota Penguji : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.**

Jakarta, 26 Januari 2022

Pembimbing,



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul:

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA OLEH NOTARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012.

Penulisan tesis ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menempuh dan mencapai gelar Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara. Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah banyak mendapat petunjuk, pengarahan, bimbingan yang tidak ternilai harganya. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, meluangkan waktu, dan sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Athika Fatmawati, S.H., M.Kn., selaku Notaris yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penulisan tesis ini.

5. Bapak Alexander Wijaya, S.H., M.Kn., selaku Notaris yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penulisan tesis ini.
6. Para Dosen Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Seluruh Staf Karyawan bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan serta doanya agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar, dan tepat waktu.
9. Saudara-saudari penulis yang selalu memberikan dukungan serta doanya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Seluruh teman-teman kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis.
11. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam memberikan dukungan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Atas semua jasa baik tersebut penulis berdoa agar ilmu yang telah diberikan pada penulis, mendapat imbalan dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhirnya penulis menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga akhirnya Tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari tesis ini, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Januari 2022

Penulis

Muhammad Hafidz Firdaus

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS DIUJI	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan	15
D. Kerangka Konseptual.....	17
E. Landasan Teori	24
F. Metode Penelitian	31
G. Sistematika Penulisan	34
BAB II TEORI KEWENANGAN, TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN TEORI TINDAK PIDANA	37
A. Teori Kewenangan.....	37
B. Teori Kepastian Hukum	48
C. Teori Tindak Pidana	63

BAB III DATA HASIL PENELITIAN	76
A. Penegakan Hukum	76
B. Penyidik POLRI	89
C. Dasar Hukum Penyidik POLRI Meminta Keterangan Terhadap Saksi Dalam Penyidikan	95
D. Notaris	97
E. Majelis Pengawas Daerah	110
F. Putusan MK Nomor: 49/PUU-X/2012	115
G. Wawancara	121
 BAB IV IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN TERHADAP EKSISTENSI MPD DAN DAMPAK PERUBAHAN PERAN MPD TERKAIT PERSETUJUAN KEPADA PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERHADAP NOTARIS PASCA PUTUSAN MK NOMOR 49/PUU-X/2012	 128
A. Implikasi Yuridis Putusan Terhadap Eksistensi MPD Dalam Penanganan Tindak Pidana Terhadap Notaris Pasca Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012	128
B. Dampak Perubahan Peran MPD Terkait Persetujuan Kepada Penyidik POLRI Dalam Penanganan Tindak Pidana Terhadap Notaris Pasca Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012	142
 BAB V PENUTUP	153
A. Kesimpulan	153
B. Saran	155

DAFTAR PUSTAKA	156
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	163
LAMPIRAN	165

ABSTRAK

- (A) Nama : Muhammad hafidz Firdaus
(B) Judul Tesis : Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Penanganan Tindak Pidana Terhadap Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012
(C) Halaman : xi + 155 halaman + 2022
(D) Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah, Tindak Pidana, Persetujuan, Notaris.
(E) Isi :

Sepanjang Notaris yang dipanggil tersebut mematuhi dan mentaati aturan-aturan yang terdapat dalam UUJN maupun kode etik notaris, maka Notaris yang bersangkutan akan aman dari segala tindakan atau perbuatan yang melawan hukum terutama bidang hukum pidana. Pemanggilan notaris oleh penyidik kepolisian berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum. Berkenaan dengan beberapa pelanggaran hukum oleh Notaris dan seiring dengan telah diresmikan dan disahkannya UUJN, maka pihak penyidik polisi sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) UUJN, tidak perlu lagi meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN. Namun, perlu meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Notaris baik sebagai saksi maupun tersangka tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) UUJN. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat diketahui adanya perbedaan peran penyidik dalam melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Notaris baik sebagai saksi maupun tersangka suatu tindak pidana. Keberadaan Pasal 66 ayat (1) UUJN, didukung dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, yang isinya menghapus hak istimewa notaris dalam memberikan keterangan kepada polisi. Bagaimana implikasi yuridis putusan terhadap eksistensi MPD serta dampak perubahan peran MPD terkait persetujuan kepada penyidik POLRI dalam penanganan tindak pidana terhadap notaris pasca Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012? Metode penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan adalah Teori Kewenangan, Teori Kepastian Hukum dan Teori Tindak Pidana. Eksistensi MPD terhadap kewenangan Pasal 66 UUJN 30 Tahun 2004 ini telah hilang dan tidak dapat di gunakan lagi sebagai hak lembaga MPD dalam menjalankan kewenangannya di daerah. MPD masih tetap ada dan mempunyai kewenangan dan kewajiban. Hasil putusan ini dianggap sangat merugikan hak para Notaris dan semakin membebani tugas para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam pembuatan akta-akta otentik.

- (F) Acuan : 51 (1983-2016), 4 Peraturan Perundang-undangan, 5 Kamus, 2 Karya Terjemahan, 6 Artikel/Jurnal dan 5 Internet.
(G) Pembimbing : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
(H) Penulis : Muhammad hafidz Firdaus

ABSTRACT

- (A) Name : Muhammad Hafidz Firdaus
 (B) Thesis Title : *The Role of the Regional Supervisory Council in Handling Crimes Against Notaries After the Decision of the Constitutional Court Number 49/PUU-X/2012*
 (C) Page : xi + 155 page + 2022
 (D) Keyword : Regional Supervisory Council, Crime, Approval, Notary.
 (E) Content :

As long as the Notary who is summoned complies and complies with the rules contained in the UUJN and the notary code of ethics, the Notary concerned will be safe from all actions or actions that are against the law, especially in the field of criminal law. The summons of a notary by the police investigator is related to the alleged violation of the law. With regard to several violations of the law by a Notary and in line with the inauguration and ratification of the UUJN, the police investigators in accordance with Article 66 paragraph (1) of the UUJN, no longer need to ask for approval from the Regional Supervisory Council (MPD) or as regulated in Article 66 paragraph (1) UUJN. However, it is necessary to seek approval from the Notary Honorary Council (MKN) to summon and examine Notaries as witnesses or suspects of criminal acts. This is in accordance with Article 66 paragraph (1) UUJN. Based on the two articles, it can be seen that there are differences in the role of investigators in summoning and examining Notaries, both as witnesses and suspects of a crime. The existence of Article 66 paragraph (1) of the UUJN is supported by the issuance of the Constitutional Court's Decision Number 49/PUU-X/2012, which removes the privilege of notaries in providing information to the police. What are the juridical implications of the decision on the existence of the MPD and the impact of changing the role of the MPD in relation to the approval of POLRI investigators in handling criminal acts against a notary after the Constitutional Court Decision Number 49/PUU-X/2012? Normative juridical research method. The theory used is the theory of authority, the theory of legal certainty and the theory of crime. The existence of the MPD against the authority of Article 66 UUJN 30 of 2004 has disappeared and can no longer be used as the right of the MPD institution in carrying out its authority in the region. MPD still exists and has the authority and obligations. The results of this decision are considered very detrimental to the rights of Notaries and increasingly burden the duties of Notaries in carrying out their duties and positions in making authentic deeds.

- (F) Reference : 51 (1983-2016), 4 Regulations, 5 Dictionary, 2 Translatiton Work, 6 Article/Journal and 5 Internet.
 (G) Lecturer : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
 (H) Author : Muhammad Hafidz Firdaus